

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA LANGSUNG

Nanda Eka Octaviani
nandaekaoctaviani61@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to find out whether the Local Own Source Revenue and General Allocation Fund has positive influence to the direct expenditure of local government of East Java Province in 2013-2015 periods. This research has been carried out by using secondary data in the form of statement of budgetary realization of the local government which has been obtained from Statistics Indonesia (BPS) and The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). The data analysis has been done by using multiple linear regressions analysis with the support of the SPSS (Statistical Product and Service Solutions) application. The result of coefficient test shows that 96.2% variation or the change of direct expenditure can be explained by the variation of independent variable of Local Owned Source Revenue and General Allocation Fund, meanwhile the remaining 3.8% has been explained by other variables which are not included in the research model. The result of the research shows that Local Owned Source Revenue and General Allocation Fund has positive influence to the direct expenditure. The level of dependency of direct expenditure of the local government in East Java Province is more dominant to the Local Owned Source Revenue and General Allocation Fund.

Keywords: *Local owned source revenue, general allocation fund, direct expenditure.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2013-2015. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebesar 96,2% variasi atau perubahan dalam Belanja Langsung dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, sedangkan sisanya sebesar 3,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung. Tingkat ketergantungan Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur lebih dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah daripada Dana Alokasi Umum.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Langsung.*

PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah daerah menganut sistem ekonomi daerah yang telah ditetapkan oleh MPR NO XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan kebijakan otonomi daerah adalah untuk membuat pemerintah dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan efektif, efisien dan responsif.

Pelaksanaan otonomi daerah didukung dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua UU tersebut membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*), karena melalui kebijakan otonomi daerah tersebut, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menggali pendapatan daerah dan mempunyai peran dalam mengalokasikan sumber pendapatan yang bertujuan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik.

Konsekuensi dari pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah pemerintah daerah harus dapat menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang masih lemah dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Sebagian besar wilayah provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal), dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Adanya pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia menuntut masing-masing pemerintah daerah untuk lebih mandiri termasuk dalam masalah keuangannya, meski pemerintah pusat tetap memberi dana bantuan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke pemerintah daerah. DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Permasalahan DAU terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang DAU. Bagi pusat, DAU dijadikan *instrument horizontal imbalance* untuk pemerataan atau mengisi *fiscal gap*. Sedangkan bagi daerah, DAU dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah meminta DAU sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, DAU berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan *fiscal needs* tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien.

Pemerintah daerah kemudian mengalokasikan sumber-sumber dana tersebut pada belanja daerahnya, terutama belanja langsung. Belanja langsung ialah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Alokasi belanja langsung ditujukan untuk berbagai fasilitas publik terutama dalam belanja pegawai, yakni dalam hal pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Dan juga dalam belanja barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah seperti belanja bahan pakai habis, perjalanan dinas, premi asuransi, dan lain-lain. Pemerintah juga perlu memenuhi belanja modal dengan membeli atau membangun aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti gedung dan bangunan.

Dengan pencapaian tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki dengan menggunakan PAD bersamaan dengan DAU yang akan menjadi tolok ukur dalam pendanaan daerah dan menjadi motivasi dalam menggali potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kemandirian dalam pendanaan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode 2013-2015.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja langsung di provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja langsung pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode 2013-2015.

TINJAUAN TEORETIS

Otonomi Daerah

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia tumbuh semakin pesat seiring dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah; (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut Shah (dalam Mardiasmo, 2004) otonomi daerah diharapkan dapat menghasilkan dua manfaat nyata, antara lain; (1) mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan

hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah; (2) memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap.

Darise (2009) menyatakan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sedangkan prinsip otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Desentralisasi Fiskal

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 8, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi yang artinya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, yakni menggali PAD dan mengelola keuangannya.

Di samping itu, pemerintah daerah berhak untuk menerima transfer keuangan dari pemerintahan pusat. Transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah salah satunya berasal dari DAU.

Anggaran Daerah

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Dalam organisasi sektor publik, anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Sehingga dapat dikatakan bahwa anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.

APBD adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran serta menggambarkan juga perkiraan penerimaan tertentu dan sumber-sumber penerimaan daerah yang menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Konsep Pendapatan Daerah

Sesuai dengan pasal 157 dan 159 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas; (1) Pendapatan Asli Daerah (Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah); (2) Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus); (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan operasinya sesuai potensi daerahnya sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada UU Nomor 33 Tahun 2004 bahwa PAD bersumber dari empat jenis pendapatan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dana Alokasi Umum

DAU merupakan salah satu dari dana perimbangan dari pusat selain DBH dan DAK. DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya.

DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti bahwa penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah dimana daerah tersebut belum mampu memaksimalkan pendapatan asli daerahnya dikarenakan suatu hal. Untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi justru akan mendapat jumlah DAU yang lebih kecil, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketidakseimbangan fiskal antar daerah dalam menjalani era otonomi sekarang.

Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat, maka daerah bisa lebih fokus menggunakan PAD yang dimilikinya untuk meningkatkan pelayanan publik.

Alokasi Anggaran Belanja Daerah

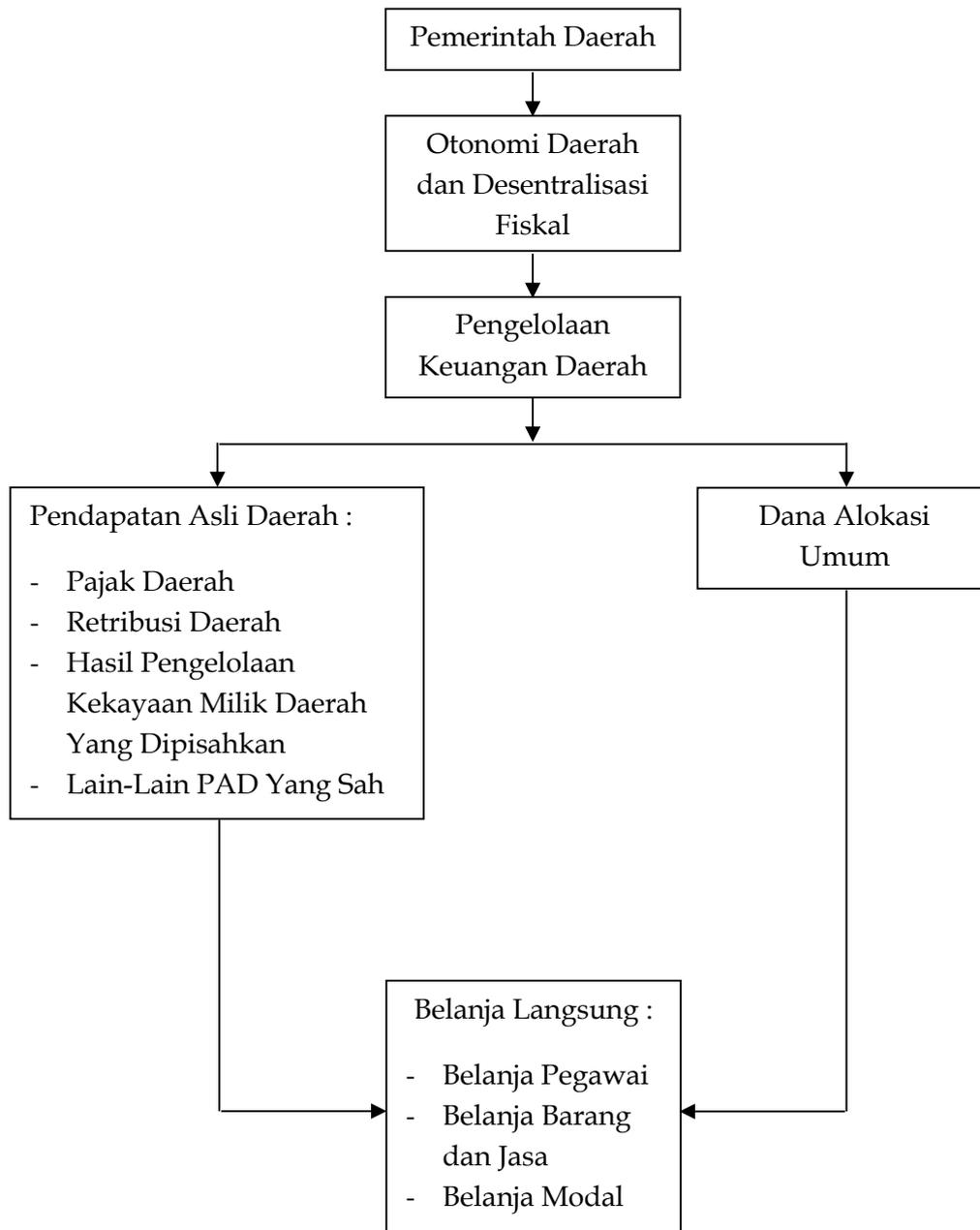
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Keberadaan anggaran belanja langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Keberadaan anggaran belanja tidak langsung bukan merupakan konsekuensi dan atau tiada suatu program atau kegiatan.

Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: (1) Belanja pegawai, merupakan belanja untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah yang diberikan kepada pegawai pemerintah daerah sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Contoh dari belanja pegawai adalah honorarium PNS, honorarium non PNS, honorarium pengelolaan dana BOS, uang lembur, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga atau masyarakat; (2) Belanja barang dan jasa, merupakan pengeluaran untuk pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Contoh dari belanja barang dan jasa adalah belanja bahan pakai habis, bahan atau material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan

kendaraan bermotor, dan lainnya; (3) Belanja modal, merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Contoh dari belanja modal adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jembatan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Rerangka Pemikiran

Keterkaitan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung dapat dilihat dalam rerangka pemikiran berikut ini:



Gambar 1

Rerangka Pemikiran

Perumusan Hipotesis

Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung

PAD merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. PAD menjadi indikator kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indraningrum (2011) memberikan bukti empiris bahwa besarnya PAD berpengaruh terhadap belanja langsung Pemerintah Daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Indraningrum, 2011:64).

Peningkatan PAD diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program dan kegiatan pemerintah daerah yang dibiayai. Setiap daerah harus mampu menggali PAD-nya dengan sebaik mungkin, meski pemerintah pusat telah memberi dana bantuan yang berupa DAU. Dengan demikian hipotesis pertama adalah:

H₁ : PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Timur

Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja langsung

DAU merupakan sumber pendapatan daerah yang yang diperoleh dari pemerintah pusat dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi akan mendapat jumlah DAU yang lebih kecil, sedangkan daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah justru akan mendapat jumlah DAU yang lebih banyak. Meskipun pemerintah daerah memperoleh DAU dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak boleh bergantung terhadap DAU. Pemerintah daerah juga harus menggali pendapatan daerahnya sendiri untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa DAU sangat berpengaruh pada belanja pemerintah daerah, seperti yang dikemukakan oleh Sari (2010) bahwa DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung, Lestari (2010) juga menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja langsung.

Tujuan dari pemberian DAU ini adalah untuk pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan (Indraningrum, 2011:66). Dengan demikian hipotesis kedua adalah:

H₂ : DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Timur

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini menurut analisis datanya termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan menganalisis data sekunder. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya, dan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada. Variabel independen dalam penelitian ini antara lain PAD dan DAU, sedangkan variabel dependennya adalah Belanja Langsung. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota.

Teknik Pengambilan Sampel

Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Artinya, populasi yang dijadikan sampel merupakan populasi yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria dalam penentuan pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu: (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 3 tahun berturut-turut pada periode 2013-2015; (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyajikan data realisasi PAD, DAU, dan Belanja Langsung dalam Laporan Realisasi APBD-nya pada periode 2013-2015.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini data yang dianalisis adalah data sekunder yang datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah PAD, DAU, dan Belanja Langsung di Provinsi Jawa Timur periode 2013 dan 2014 dan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengenai jumlah PAD, DAU, dan Belanja Langsung di Provinsi Jawa Timur periode 2015 kecuali kabupaten Bangkalan dan kota Madiun.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Variabel PAD diukur dengan rumus:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-Lain PAD yang Sah}$$

DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan belanja daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil, namun yang kebutuhan fiskalnya besar, akan memperoleh DAU yang relatif besar (Sari, 2010). Dalam penelitian ini DAU dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2013-2015.

Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja langsung.

Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan yang telah dianggarkan. Belanja langsung dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Belanja Langsung} = \text{Belanja Pegawai} + \text{Belanja Barang dan Jasa} + \text{Belanja Modal}$$

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik *Normal Probability Plot*. Dasar pengambilan keputusannya adalah: (1) jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas; dan (2) jika data menyebar lebih jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Untuk meyakinkan kesimpulan pengujian distribusi normal, uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Menurut Ghozali (2006), dasar pengambilan keputusannya yaitu: (1) jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal; dan (2) jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen.

Adanya multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Dasar pengambilan keputusannya adalah: (1) jika nilai *Tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas; dan (2) jika nilai *Tolerance* < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Ghozali (2006:95) menyatakan uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji statistik *Durbin-Watson* (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut: (1) angka D-W di bawah -2 berarti terjadi autokorelasi positif; (2) angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi; dan (3) angka D-W di atas +2 berarti terjadi autokorelasi negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas.

Menurut Ghozali (2001:69) salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas.

Untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas, maka dapat digunakan uji glejser. Menurut Ghozali (2006), dasar pengambilan keputusannya adalah: (1) jika tingkat

signifikansi berada di atas 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas; dan (2) jika tingkat signifikansi berada di bawah 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda yaitu jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung lebih dari satu. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$BL = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + e$$

Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) adalah sebagai alat pengukur variasi sekitar regresi, yaitu jumlah presentasi variasi yang dapat dijelaskan. Nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Nilai R^2 yang kecil maka variabel independen tidak berkorelasi dengan variabel dependen. Jika nilai yang mendekati 1 maka variabel independen dengan variabel dependen berkorelasi sempurna.

Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F)

Uji Statistik F digunakan untuk menguji signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk menguji kelayakan model penelitian. Uji statistik F dalam penelitian ini menggunakan nilai *p-value* atau *level of significant* yaitu 5% atau 0,05. Prosedur pengujian kesesuaian model adalah sebagai berikut: (1) jika nilai signifikansi (*p-value*) < 0,05 maka terdapat kesesuaian variabel independen terhadap variabel dependen; dan (2) jika nilai signifikansi (*p-value*) > 0,05 maka tidak terdapat kesesuaian variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial per variabel independen terhadap variabel dependennya, apakah per variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel dependen atau tidak.

Signifikan atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan melihat probabilitas dari rasio masing-masing variabel independen pada taraf nyata $\alpha = 0,05$. Pengambilan keputusannya adalah: (1) jika nilai signifikan $t < 0,05$ maka terdapat pengaruh signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen; dan (2) jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dari grafik *Normal Probability Plot*, data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, yang berarti menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Untuk meyakinkan hasil uji normalitas, dapat menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika didapatkan angka signifikansi jauh diatas 0,05 berarti nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik. Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* > 0,05 yaitu 0,200 > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Cara menguji multikolonieritaas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Infation Factor* atau VIF (Ghozali, 2006:91).

Dari hasil uji multikolinearitas, dapat diketahui bahwa variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak ada yang memiliki nilai *Tolerance* yang kurang dari 0,10. Selain itu juga diketahui bahwa variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak ada yang memiliki nilai VIF yang lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka diidentifikasi terjadi masalah autokorelasi. Regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi autokorelasi di dalamnya. Untuk mendeteksi ada dan tidak adanya gejala autokorelasi dapat dilihat dari tabel *Durbin Watson* (D-W), yaitu apabila angka D-W berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi.

Hasil uji autokorelasi dengan uji *Durbin Watson* (D-W) dapat diketahui bahwa nilai D-W sebesar 1,871 yang berarti angka D-W terletak diantara -2 sampai +2 ($-2 < 1,871 < 2$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak mengandung gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2012: 139).

Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu yang pertama dari hasil uji heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta menyebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Kedua, dengan Uji Glejser, dimana dari hasil uji glejser dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independen jauh diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diteliti tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas atau bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2006:81).

Hasil analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	86307941,307	24123720,556		3,578	,001		
1 PAD	,929	,024	,838	38,435	,000	,861	1,162
DAU	,379	,029	,286	13,132	,000	,861	1,162

a. Dependent Variable: BL

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 1, maka dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$BL = 86307941,307 + 0,929 PAD + 0,379 DAU + e$$

Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikat. *R Square* menunjukkan koefisien determinasi. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,981 ^a	,962	,962	71216004,352	1,871

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BL

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel di atas, hasil koefisien determinasi (R^2) nilai *R Square* sebesar 0,962, hal ini berarti 96,2% variasi Belanja Langsung dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, sedangkan sisanya 3,8% ($100\% - 96,2\% = 3,8\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F)

Uji Statistik F digunakan untuk menguji kelayakan model regresi linear berganda dalam mengukur pengaruh variabel bebas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap variabel terikat Belanja Langsung (BL). Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model cocok sebagai variabel penjelas variabel terikat.

Tabel 3
Hasil Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	119369124017628 12000,000	2	59684562008814 06000,000	1176,811	,000 ^b
	Residual	466598173374598 850,000	92	50717192758108 57,000		
	Total	124035105751374 11000,000	94			

a. Dependent Variable: BL

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel di atas hasil uji kelayakan model (*goodness of fit*) menunjukkan bahwa F hitung sebesar 1176,811 dengan tingkat signifikansi 0,000 berarti $\alpha < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum merupakan variabel penjelas Belanja Langsung.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006: 84).

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	86307941,307	24123720,556		3,578	,001		
	PAD	,929	,024	,838	38,435	,000	,861	1,162
	DAU	,379	,029	,286	13,132	,000	,861	1,162

a. Dependent Variable: BL

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel di atas hasil uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) menunjukkan bahwa variabel PAD dan DAU memiliki probabilitas signifikan $< 0,05$ yang berarti kedua variabel tersebut berpengaruh positif terhadap belanja langsung.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Hasil output regresi untuk variabel PAD menunjukkan angka signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung. Artinya hipotesis pertama diterima, bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung.

Semakin meningkatnya PAD suatu daerah maka semakin leluasa pula pemerintah daerah dalam mengalokasikan pengeluarannya untuk alokasi belanja langsung yang merupakan bagian dari belanja daerah. Sebagai contoh peningkatan belanja pegawai, yaitu meningkatnya honorarium atau uang lembur pegawai ketika pegawai tersebut melakukan pekerjaannya. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan belanja barang dan jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah seperti belanja bahan atau material, sewa rumah atau gedung, dan lainnya. Dan juga pemerintah harus meningkatkan alokasi belanja modal yang termasuk di dalam kelompok belanja langsung, seperti membangun gedung atau bangunan, jalan, dan aset berwujud lainnya yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Belanja Langsung lebih dominan terhadap PAD dibandingkan dengan DAU. Artinya, kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur dalam menggali PAD-nya sudah baik, sehingga tidak terlalu bergantung dari DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pemberian subsidi berupa DAU bertujuan untuk menanggulangi kesenjangan fiskal antar daerah yang disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang berbeda-beda antar daerah serta kurang optimalnya upaya penggalan sumber pendapatan tersebut.

Hasil output regresi untuk variabel DAU menunjukkan angka signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung. Artinya hipotesis kedua diterima, bahwa DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung.

Apabila DAU suatu daerah meningkat, maka pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur juga dapat meningkatkan Belanja Langsungnya yang terdiri dari belanja pegawai seperti honorarium PNS maupun non PNS, honorarium pengelolaan dana BOS. Selain belanja pegawai, pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur juga harus meningkatkan belanja modal dan juga belanja barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2010) yang membuktikan bahwa DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Dalam penelitian ini tingkat ketergantungan Belanja Langsung terhadap DAU lebih kecil daripada terhadap PAD. Artinya, tidak terjadi *flypaper effect* di dalam pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu suatu keadaan dimana pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari *transfer/grants* yang bersifat tidak bersyarat (*unconditional grants*) daripada PAD-nya sehingga akan menimbulkan pemborosan dalam belanja daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung. Berdasarkan hasil penelitian

yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja langsung.

Ketika PAD dan DAU pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur meningkat, maka pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur juga harus meningkatkan belanja langsungnya, yang di dalamnya terdapat belanja pegawai seperti honorarium PNS, honorarium non PNS, serta uang lembur. Dan juga pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur juga harus meningkatkan belanja barang dan jasa seperti belanja bahan habis pakai, belanja bahan atau material, belanja premi asuransi, dan belanja barang dan jasa lainnya. Serta pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur harus mampu meningkatkan belanja modalnya seperti pengadaan gedung, bangunan, jembatan, jalan, irigasi, dan aset tetap lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tingkat ketergantungan belanja langsung Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur lebih dominan terhadap PAD daripada DAU. Hal ini berarti bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam menggali PAD-nya sudah baik, sehingga tidak terlalu bergantung terhadap DAU yang dikirim oleh pemerintah pusat. Kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur juga sudah baik, sehingga tidak terjadi *flypaper effect* yang dapat menimbulkan pemborosan dalam belanja daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran yaitu: 1) Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang mempengaruhi Belanja Langsung. Pemerintah Daerah baik Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur maupun di luar Provinsi Jawa Timur disarankan untuk lebih menggali lagi Pendapatan Asli Daerah-nya agar tidak terlalu bergantung pada Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tersebut untuk mensejahterakan masyarakat di daerahnya masing-masing, khususnya dalam Belanja Langsung yang di dalamnya terdapat Belanja Modal, Belanja Pegawai, serta Belanja Barang dan Jasa; dan 2) Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambah periode tahun penelitian menjadi 4 tahun sampai 5 tahun atau lebih, karena di dalam penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian 3 tahun, yaitu tahun 2013-2015. Selain itu, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan populasi atau sampel dari Pemerintah Daerah selain Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur serta menambah variabel independen lain yang belum digunakan dalam penelitian ini sehingga hasil penelitian selanjutnya akan mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, N. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah : Pedoman Untuk Eksekutif Dan Legislative Rangkuman 7 Undang - Undang, 30 Peraturan Pemerintah Dan 15 Permendagri*. Edisi 2. PT Indeks. Jakarta.
- Ghozali, I. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 2. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2009. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 1. Salemba Empat. Jakarta.

- Indraningrum, T. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Lestari, Tri. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Langsung pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi. Medan.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 15 Mei 2006. Jakarta.
- Rahmawati, N. I. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sari, N. P. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau. *Tesis*. <http://kampoengakuntansi.blogspot.com>. Diakses tanggal 15 Juni 2016.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. 28 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286. Jakarta.
- _____. Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.